

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI KETUT CINTIARI KARTIKANINGRUM
NIM : 1915644069**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

**Ni Ketut Cintiarri Kartikaningrum
1915644069**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan otonomi daerah. Namun pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi kesenjangan. Ketidaksiapan terhadap sistem pemerintahan daerah dan otonomi daerah sehingga menimbulkan kesenjangan pada pembangunan suatu daerah, selanjutnya terkait ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu melalui pengukuran kinerja keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode tahun 2017-2021 yang diperoleh melalui website Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Pengujian variabel penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan aplikasi *IBM SPSS Statistic* versi 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, kinerja keuangan pemerintah daerah

***THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT REVENUE,
BALANCING FUNDS AND CAPITAL EXPENDITURES
ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF
LOCAL GOVERNMENTS***

**Ni Ketut Cintiarı Kartikaningrum
1915644069**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Bali is one of the provinces in Indonesia that has implemented regional autonomy policies. However, in reality, the regional autonomy policies implemented by the central government have not been running smoothly due to significant disparities. The unpreparedness of regional government systems and regional autonomy has resulted in disparities in the development of certain areas. Moreover, there are issues related to fiscal dependence, subsidies, and central government assistance, which demonstrate the limitations of Local Government Revenue (PAD) in financing regional expenditures. In this regard, local governments must be proficient in managing their governance to establish good governance and conduct periodic evaluations of their performance through financial performance measurements.

This research aims to examine the effect of local government revenue, balancing funds, and capital expenditures on the financial performance of local governments. This research analyzes secondary data sources, including the Budget and Expenditure of Local Government and the Realization of Budget and Expenditure of Local Government in Bali Province for the period from 2017 to 2021, obtained from the Central Bureau of Statistics of Bali Province's website. The research variables were tested using descriptive analysis, classical assumption tests, and hypothesis testing through IBM SPSS Statistics version 26.

The results of the study show that both partially and simultaneously, local government revenue, balancing funds, and capital expenditures have a positive and significant influence on the financial performance of local governments in the districts/cities of Bali Province.

Keywords: local government revenue, balancing funds, capital expenditures, financial performance of local governments.

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi
Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : NI KETUT CINTIARI KARTIKANINGRUM
NIM : 1915644069**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Ketut Cintiarı Kartikaningrum
NIM : 1915644069
Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Pembimbing : Ni Nengah Lasmini, S.S. T.Ak., M.Si.
Wayan Eny Mariani, S.M.B., M.Si.
Tanggal Uji : 21 Agustus 2023

Skripsi yang ditulis merupakan hasil karya orisinal dan bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 21 Agustus 2023



Ni Ketut Cintiarı Kartikaningrum
NIM. 1915644069

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : NI KETUT CINTIARI KARTIKANINGRUM
NIM : 1915644069**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



**Ni Nengah Lasmini, S.S. T.Ak., M.Si.
NIP. 199109102020122004**



**Wawan Eny Mariani, S.M.B., M.Si.
NIP. 199103172020122002**

JURUSAN AKUNTANSI

KETUA



**I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001**

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 21 Bulan Agustus Tahun 2023

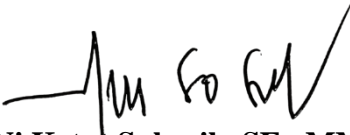
PANITIA PENGUJI

KETUA :

- 
- 
1. **Ni Nengah Lasmuni, S.S. T.Ak., M.Si.**
NIP. 199109102020122004

ANGGOTA :

- 
- 
2. **Wayan Tari Indra Putri, S.S T.Ak., M.Si.**
NIP. 199212272019032027

- 
3. **Ni Ketut Sukasih, SE., MM.**
NIP. 196602261993032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Cening Ardina, SE. M. Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Ni Nengah Lasmini, S.S. T.Ak., M.Si, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Wayan Eny Mariani, S.M.B., M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pegawai Divisi Akuntansi dan Penatausahaan Aset Kantor Gubernur Bali yang telah memberikan saran dan bantuan dalam mencari data yang saya perlukan.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
8. Kekasih saya yang telah dengan setia memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini; dan
9. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, 21 Agustus 2023


Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teori	14
B. Kajian Penelitian yang Relevan	22
C. Kerangka Pikir	27
D. Hipotesis Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel Penelitian	39
D. Variabel Penelitian dan Definisi	40
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Deskripsi Hasil Penelitian	52
B. Analisis Uji Hipotesis.....	64
C. Pembahasan	69
D. Keterbatasan Penelitian.....	81
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	82
A. Simpulan	82
B. Implikasi.....	83
C. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH.....	4
TABEL 3.1 KRITERIA EKONOMI	37
TABEL 3.2 KRITERIA EFISIENSI.....	38
TABEL 3.3 KRITERIA EFEKTIVITAS.....	39
TABEL 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH.....	47
TABEL 4.2 DANA PERIMBANGAN	49
TABEL 4.3 BELANJA MODAL	51
TABEL 4.4 KINERJA KEUANGAN	52
TABEL 4.5 STATISTIK DESKRIPTIF	54
TABEL 4.6 HASIL UJI NORMALITAS	56
TABEL 4.7 HASIL UJI AUTOKORELASI	57
TABEL 4.8 HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS	58
TABEL 4.9 HASIL UJI MULTIKOLINIEARITAS	59
TABEL 4.10 HASIL ANALISIS LINEAR BERGANDA.....	60
TABEL 4.11 HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI.....	62
TABEL 4.12 HASIL UJI SIMULTAN.....	62
TABEL 4.13 HASIL UJI PARSIAL.....	63



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 GRAFIK PERKEMBANGAN REALISASI APBD	2
GAMBAR 1.2 GRAFIK PROPORSI KOMPONEN APBD.....	3
GAMBAR 1.3 PERSENTASE PENDAPATAN ASLI DAERAH	6
GAMBAR 2.1 KERANGKA PIKIR	29
GAMBAR 2.2 HIPOTESIS PENELITIAN.....	33



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : HASIL UJI ANALISIS DATA DESKRIPTIF	88
LAMPIRAN 2 : HASIL UJI NORMALITAS	88
LAMPIRAN 3 : HASIL UJI AUTOKORELASI	89
LAMPIRAN 4 : HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS	89
LAMPIRAN 5 : HASIL UJI MULTIKOLINIEARITAS	89
LAMPIRAN 6 : HASIL UJI LINIEAR BERGANDA	90
LAMPIRAN 7 : HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI	90
LAMPIRAN 8 : HASIL UJI SIMULTAN (F).....	90
LAMPIRAN 9 : HASIL UJI PARSIAL (T)	91
LAMPIRAN 10 : DATA SEKUNDER	92
LAMPIRAN 11 : TABULASI DATA.....	93



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

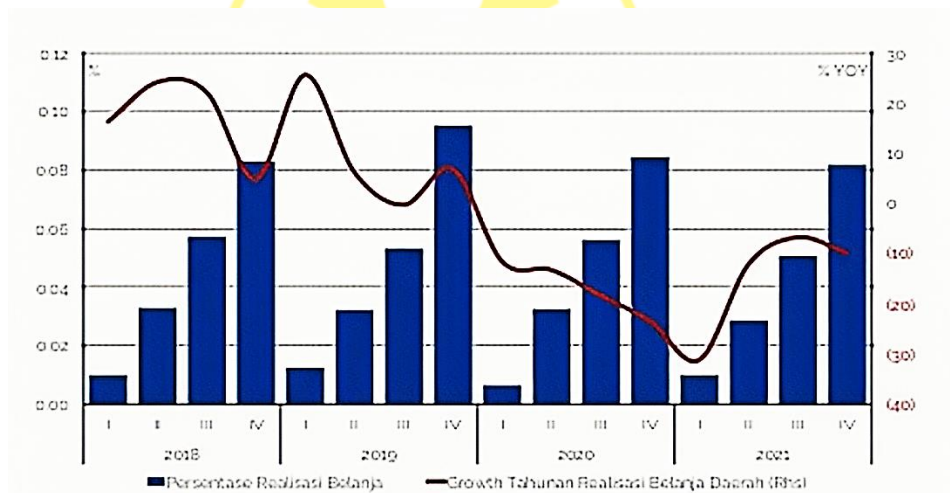
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah menerapkan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah ini diawali dengan penyerahan wewenang atau tanggungjawab yang bersumber dari pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah yang bersangkutan. Kebijakan otonomi daerah ini dilaksanakan dengan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 (lalu diganti menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan kemudian direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014) mengenai Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 (lalu jadi UU Nomor 33 Tahun 2004 kemudian mengalami revisi menjadi UU Nomor 1 Tahun 2022) mengenai Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan pelayanan publik yang sebelumnya tertinggal. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya dan mengantarkan masyarakat menuju keberhasilan atau dapat mensejahterahkan masyarakat melalui potensi dan kemampuan yang ada di masing-masing daerah.

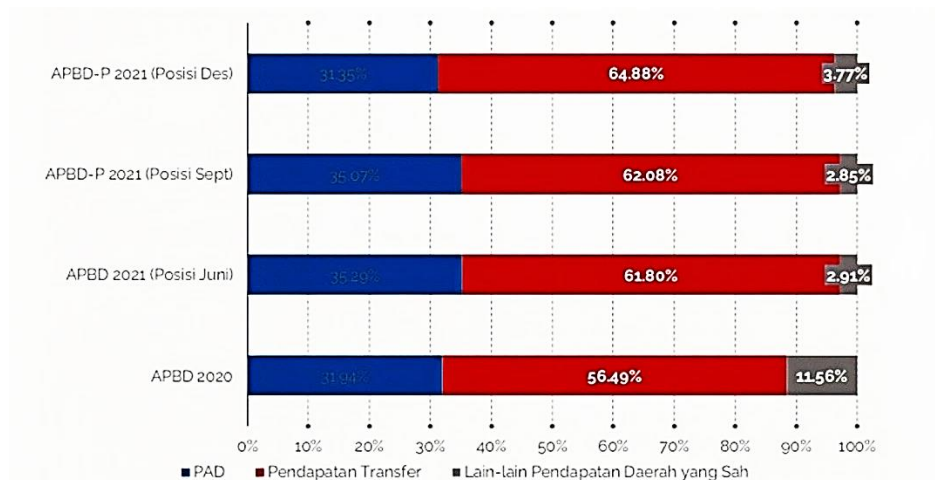
Pada kenyataannya kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyak terjadi kesenjangan. Ketidaksiapan terhadap sistem pemerintahan daerah

dan otonomi daerah sehingga menimbulkan kesenjangan pada pembangunan suatu daerah. Adapun bentuk kesenjangan yang terjadi telah menghasilkan suatu konsekuensi berupa pemusatan hasil pembangunan pada sebagian wilayah (Saeful Kholik, 2020). Kesenjangan selanjutnya yakni ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Gita Dinata, 2013).



Sumber: Lampiran 10 (data sekunder diolah), tahun 2023

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali



Sumber: Lampiran 10 (data sekunder diolah), tahun 2023

Gambar 1.2 Grafik Proporsi Komponen APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 hingga 2021 menimbulkan dampak penurunan dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, khususnya pada sektor pariwisata. Pemberlakuan kebijakan pemerintah untuk menutup semua akses terkait sektor pariwisata dan pembatasan sosial berskala besar menjadi salah satu penyebab dari penurunan perekonomian. Hal tersebut tentu tidak terlepas pada provinsi Bali yang juga terkena akan dampak masa pandemi tersebut. Berdasarkan data yang bersumber pada www.bi.go.id menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Provinsi Bali tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan penurunan anggaran pada komponen Pendapatan Asli Daerah. Penurunan PAD sejalan dengan perkiraan masih terbatasnya aktivitas dari pariwisata dan daya beli masyarakat sehubungan dengan keberlanjutan pandemi COVID-19 di tahun 2021 yang berpengaruh pada penurunan pendapatan daerah. Adapun pada

anggaran pendapatan gabungan kabupaten/kota di provinsi Bali bahwasannya terdapat lebih tingginya anggaran pendapatan transfer (dana perimbangan) dibandingkan dengan komponen pendapatan lainnya yakni terbatasnya perolehan pendapatan daerah dari pajak daerah (pajak hotel, restoran, hiburan) serta retribusi daerah wisata sehubungan dengan sektor pariwisata yang belum sepenuhnya pulih mempertimbangkan penurunan kinerja pendapatan asli pemerintah daerah akibat pandemi COVID-19 serta upaya percepatan pemulihan ekonomi dan penanggulangnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah yang berkaitan dengan konsep *New Public Management*. Penerapan konsep *New Public Management* telah menyebabkan terjadi perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Penerapan konsep *New Public Management* dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Perubahan tersebut

juga telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Konsep ini mengharuskan pemerintah untuk melaksanakan anggaran yang berbasis kinerja dimana pelaksanaannya harus bersifat transparan dan akuntabel. Dengan demikian tata kelola pemerintahan yang baik akan dapat tercapai.

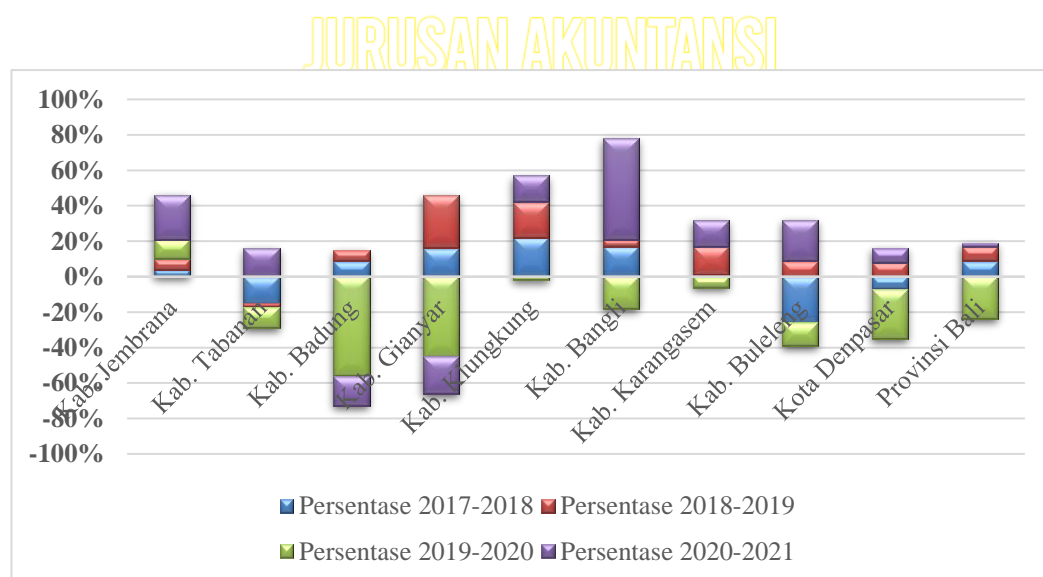
Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Adapun alat pengendali sekaligus alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah yang direalisasikan melalui belanja pemerintah dapat menggunakan skema alat ukur yaitu Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja, dengan memfokuskan pada prinsip metode *Value For Money*. Metode ini merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Sehingga metode ini sangat dibutuhkan sebagai pendukung dalam pengelolaan keuangan daerah. (Putra dan Wirawati, 2015).

Berikut adalah perhitungan persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Daerah Provinsi Bali tahun 2017 hingga 2021.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Jembrana	121.342.475	126.477.267	133.698.784	148.045.103	185.004.035
Kab. Tabanan	426.635.751	363.370.469	354.558.239	313.042.530	362.314.631
Kab. Badung	4.172.457.396	4.555.716.407	4.835.188.460	2.116.974.302	1.750.345.226
Kab. Gianyar	662.753.475	770.204.849	997.478.368	545.869.873	430.172.109
Kab. Klungkung	153.210.776	186.974.284	225.063.772	220.893.875	254.494.496
Kab. Bangli	104.592.163	122.686.254	127.040.436	104.325.150	163.537.096
Kab. Karangasem	198.575.057	200.361.247	233.013.033	219.176.733	252.688.747
Kab. Buleleng	455.195.426	335.555.494	365.595.301	318.986.891	391.988.445
Kota Denpasar	1.008.710.712	940.110.335	1.010.779.481	731.261.281	792.362.414
Provinsi Bali	3.398.472.278	3.718.499.635	4.023.156.316	3.069.474.218	3.117.070.009

Sumber: Lampiran 10 (Data sekunder), tahun 2023



Sumber: Lampiran 10 (data sekunder diolah), tahun 2023

Gambar 1.3 Persentase Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2017 hingga 2021 cenderung mengalami fluktuasi dari segi pertumbuhannya. Dapat dilihat pada pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung dan Gianyar mengalami penurunan yang cukup signifikan yang dapat dilihat melalui persentase pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan 56% pada Kabupaten Badung dan penurunan 45% pada Kabupaten Gianyar. Pada tahun 2020-2021 juga mengalami penurunan yaitu 17% pada Kabupaten Badung dan 21% pada Kabupaten Gianyar, sedangkan untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali lainnya mengalami kenaikan pada tahun 2021. Sejalan dengan yang kita ketahui bahwa pada tahun 2020-2021 terjadi kasus pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, hal ini tidak terlepas bahwa Bali juga mengalami masa pandemi COVID-19. Hal itu mengakibatkan pergerakan atau pertumbuhan perekonomian mengalami penurunan, yang berdampak pada pendapatan asli daerah pada tiap daerah mengalami penurunan karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi COVID-19.

Pertumbuhan pendapatan daerah yang semakin tinggi dan tiap tahunnya bernilai positif mencerminkan bahwasannya pertumbuhan pendapatan daerahnya mampu ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah ialah pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Pendapatan asli daerah

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah mempunyai keterkaitan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat serta melindungi dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sumber pendapatan daerah lain yang memiliki peran penting pada struktur APBD ialah Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan pendapatan transfer yaitu dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tingginya dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah (Wiguna, 2015). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan selain dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Tujuan dari dana alokasi khusus untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan dana alokasi khusus diarahkan kepada

kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis jangka panjang. Dana alokasi khusus diberikan bertujuan untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu dan guna mendorong percepatan pembangunan daerah.

Salah satu kegiatan belanja daerah juga turut berperan dalam menghasilkan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi-potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kualitas pelayanan publik pada suatu daerah. Salah satunya yakni belanja modal. Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Kegiatan belanja modal dapat dikatakan sebagai kegiatan investasi yang dilakukan pemerintah daerah, namun walaupun demikian kegiatan belanja modal pada pemerintah daerah tidak bertujuan untuk mencari profit. Salah satu kegiatan dalam belanja modal yang mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan yaitu pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum. Berkembang pesatnya pembangunan infrastruktur di suatu daerah, mampu mendorong kegiatan investasi di daerah tersebut, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan daerah pada masa yang akan

datang, perekonomian daerah yang semakin berkembang dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal ditambah dengan belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang diharapkan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya maka semakin baik pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Sebaliknya semakin rendah angka rasionya maka semakin buruk pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya yang juga meneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah ialah penelitian Hasna dan Haryanto (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pada sisi lain penelitian yang dilakukan Novia dan Ayu (2019) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang memberikan indikasi bahwa semakin meningkatnya perolehan pendapatan asli daerah dan penerimaan dana perimbangan dapat menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan akan hasil penelitian yang sebelumnya beserta fenomena yang terjadi seperti yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dilakukan penelitian mengenai faktor apa yang mempengaruhi kinerja

keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode Tahun 2017 hingga 2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017 hingga 2021?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017 hingga 2021?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017 hingga 2021?
4. Apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh secara bersamaan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017 hingga 2021?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui pengukuran metode *Value For*

Money terkait konsep *New Public Management* pada Pemerintah Daerah Provinsi Bali periode tahun 2017 hingga 2021 saja.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat mengetahui pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017 hingga 2021.
- 2) Untuk dapat mengetahui dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017 hingga 2021.
- 3) Untuk dapat mengetahui belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017 hingga 2021.
- 4) Untuk dapat mengetahui pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh secara bersamaan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017 hingga 2021.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara garis besar bermanfaat untuk mengetahui pendapatan asli daerah , dana perimbangan dan belanja

modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Periode Tahun 2017 hingga 2021.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Politeknik Negeri Bali

Diharapkan dapat mengembangkan bidang pengetahuan akuntansi terkhususnya akuntansi pemeritahan dalam rangka memperluas pendidikan dan penyempurnaan materi perkuliahan khususnya pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

2) Bagi Mahasiswa

Mendapatkan kesempatan dalam memperluas wawasan serta pengetahuan mengenai dunia pemerintahan dan berkesempatan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

3) Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan solusi alternatif pemecahan masalah yang terjadi dalam keterkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang berupa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal yang mempengaruhi kinerja keuangan sehingga pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini meneliti pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode Tahun 2017 hingga 2021. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode Tahun 2017 hingga 2021.
2. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode Tahun 2017 hingga 2021.
3. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode Tahun 2017 hingga 2021.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Periode Tahun 2017 hingga 2021.

B. Implikasi

Penelitian ini mengharapkan implikasi yang positif diantaranya:

1. Implikasi teoritis

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara teoritis, penelitian yang dilakukan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan pengembangan pengetahuan terkait pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat diantaranya:

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal menjadi lebih baik lagi sehingga pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja sesuai dengan konsep *New Public Management*.
- b. Bagi Politeknik Negeri Bali, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan materi terkait akuntansi pemerintahan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali dan dapat digunakan sebagai sumber acuan untuk mahasiswa Politeknik Negeri Bali

untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait variabel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Saran

Dengan adanya keterbatasan pada penelitian yang telah diuraikan dan diperlukannya saran sebagai bahan perbaikan diantaranya:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali diharapkan mampu mengelola dan meningkatkan potensi daerah masing-masing agar dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, tata kelola pemerintah yang baik dan tujuan dari penerapan kebijakan otonomi daerah berjalan dengan optimal.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperbaiki kekurangan dari penelitian ini dengan menggunakan analisis rasio lainnya selain melalui pendekatan *value for money*, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Udayana University."
- Alfarish, H Salman. (2015). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang* 2 (6): 23-34.
- Angelina, Nora, Yulia Efni, and M Rasuli. (2020). "Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2014-2018." *Jurnal Bahtera Inovasi Vol. 4 No. 1 Tahun 2020* 4(1).
- Alvy Mulyaningtyas, Nur Sayidah, and Mustika Winedar. (2015). 'Implementasi Konsep New Public Management Di Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Surabaya', *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 12.1 (2015), 39–52.
- Fernandes, Joni, and Silviani Putri. (2022). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat." *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3(1): 198–209.
- Kholik, Saeful. (2020). "Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6(1): 56.
- Karlinda, Ai Elis, Putri Azizi, and Mardhatila Fitri Sopali. (2021). "Pengaruh Pengalaman Kerja, Prestasi Kerja, Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Pengembangan Karir Pada PT. PLN (Persero) Kota Padang Rayon Kuranji." *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*. 5(2): 523–31.
- Lathifa, Hasna. (2019). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017." *Diponegoro Journal of Accounting* 8(2): 1–10.
- Mulyaningtyas, Alvy, Nur Sayidah, and Mustika Winedar. (2015). "Implementasi Konsep New Public Management Di Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Surabaya." *Jurnal Akuntansi dan Auditing* 12(1): 39–52.

Mulyani, Sri dan Wibowo, Hardiyanto. (2017).” Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015). “*KOMPARTEMEN*, Vol. XV No.1, Maret 2017.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Niswani, Novita, Ikhyanuddin Ikhyanuddin, Rayyan Firdaus, and Nurhasanah Nurhasanah. (2022). “Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020.” *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)* 1(1): 65.

Nauw, Ester Trivona. (2021). “Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*: 1–17.

Putri, Ni Kadek Novia Indrawati, and Ni Putu Ayu Darmayanti. (2019). “Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali.” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 8(5): 2834.

Prastiwi, Nanda Dipa, and Andri Waskita Aji. (2020). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 28(1): 89–105.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 Tentang Bagan Akun Standar.

Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Republik Indonesia. (2003). Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.

Simamora, Winanda Chyntia, and Gideon Setyo Budiwitjaksono. (2022). “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal

Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6(2): 410.

Sari, Novita et al. (2020). “Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan.” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 4(1): 219–23.

Wahyudi Ihsan. (2020). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat.” *Indonesian Accounting Research Journal* 1(1): 86–97.

Wiguna, Kusnadi Yudha. (2015). “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan.” *Fordema* 12(1): 1–50.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI